

BAB III

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI KPU BANTUL DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 DI KABUPATEN BANTUL

Dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisis peran dan fungsi KPUD Bantul, dalam pemilu tahap pertama atau pemilu legislatif yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 9 April 2009.

Fungsi dan peranan KPU sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena penyelenggara Negara terpilih melalui hasil kerja KPU menyelenggarakan pemilihan umum. Dengan demikian tepatlah apa yang menjadi keputusan rakyat melalui TAP MPR No. IV Tahun 1999 tentang GBHN dan dalam pasal 22 E perubahan ketiga UUD 1945 Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU bersifat Nasional, tetap dan mandiri sehingga hasil kerjanya dipercaya rakyat.

Sebelumnya perlu ditegaskan disini bahwa pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan di daerah Kabupaten Bantul, adalah tanggung jawab penuh KPUD Bantul sebagai daerah kerja atau wilayah kerjanya. Namun dalam pelaksanaan kerjanya, tentunya KPUD Bantul membangun sistem kerjasama dengan beberapa lembaga dan instansi-instansi di tingkat daerah Bantul yang diminta kerjasama guna kelancaran pelaksanaan tugas KPUD Bantul dalam melaksanakan pemilu di tingkat Kabupaten.

Dalam pelaksanaan peran maupun fungsinya KPUD Bantul bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang seperti telah diketahui bahwa

sebelumnya peran dan fungsi KPU secara garis besar sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pemilihan umum. Dan dalam UU No.22/2007 itu pula tegaskan peran dan fungsi KPU Kabupaten/Kota yang kemudian dijadikan sebagai dasar acuan bagi gerak laju kinerja KPU Bantul dalam menjalankan segala bentuk peran dan fungsi yang terkait dengan perihal pelaksanaan pemilu ditingkat Kabupaten Bantul.

Jadi dalam menjalankan peran dan fungsinya KPU Kab. Bantul tidak boleh dan tidak bias keluar dari jalur-jalur yang sudah ditentukan dalam UU No. 22 Tahun 2007. Disamping itu KPU Kabupaten Bantul sebagai salah satu bagian dari struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugasnya juga harus dilaksanakan instruksi ataupun tugas lainnya yang sewaktu waktu bisa diberikan oleh KPU Pusat maupun Provinsi.

Tugas Dan Wewenang KPU Kabupaten Bantul Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Bantul.

Pada tahap awal pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Bantul yang sudah terbentuk melakukan perencanaan pelaksanaan pemilu legislatif dengan menempuh langkah-langkah yang sudah termasuk dalam tugas dan kewajiban selaku penanggung jawab pelaksanaan pemilu di tingkat Kabupaten. Sebelum melakukan perencanaan pelaksanaan pemilu legeslatif maka diadakan sosialisasi terhadap semua lembaga yang akan menjadi target sasaran pelaksanaan pemilu. Lembaga itu terdiri dari ormas yang meliputi putra-putri Bantul melalui jalan sehat, mahasiswa KKN UGM yang langsung terjun ke masyarakat untuk membantu proses sosialisasi ke pondok

pesantren dan sekolah, karena sebagian besar anak sekolah dan pondok pesantren merupakan pemilih pemula pada tanggal 21 Maret 2009. Perangkat desa digabung dengan dinas terkait yang meliputi Lurah, Dukuh, Camat, Muspida, Bupati, DPR, Kapolres, Kejaksaan Pengadilan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2009. Sosialisasi terhadap narapidana dilakukan oleh KPU Bantul ke Rutan pada tanggal 23 Maret 2009. Masyarakat umum yang meliputi pedagang, pengunjung pantai parangtritis dan samas, pasar bantul dan pasar niten dilakukan pada tanggal 24 Maret 2009. Partai politik yang hadir untuk melakukan sosialisasi meliputi, PDIP, Demokrat, HANURA, PPP, GOLKAR, PKB, GERINDRA, PBN, PAN PKS. Masing-masing lembaga melakukan sosialisasi sebanyak satu kali hal ini dilakukan mengingat keterbatasan waktu dan anggaran yang terbatas.

Pendataan penduduk yang akan memilih maka KPU Bantul bekerjasama atau berkoordinasi dengan pihak BPS (Badan Pusat Statistik) Bantul. Syarat utama untuk menjadi pemilih adalah penduduk Bantul yang berumur 17 tahun yang sudah menikah atau sudah pernah menikah. Data semacam ini di dapat dari BPS Bantul yang diminta oleh KPU Bantul. Namun ketika pendataan pemilih sudah berjalan, terdapat permasalahan serius yang ditemui. Dimana terdapat gugatan dari masyarakat setempat kepada pihak KPU karena masih adanya penduduk yang memenuhi syarat tapi tidak di daftar oleh KPU sebagai peserta dalam pemilihan legislatif. Menyikapi polemik ini pihak KPU Bantul beserta segenap jajarannya memproses pengaduan ini dengan mencari solusi dan titik temu kenapa permasalahan ini muncul.

Setelah diproses ditingkat KPU Bantul, ternyata permasalahan ini muncul karena kesalahan pihak BPS yang memberikan data penduduk kepada KPU Bantul. Dimana terkait dengan permasalahan ini ternyata pihak BPS pada waktu mengadakan pendataan penduduk di Kab. Bantul, personil lapangan yang ditugaskan kurang begitu mengetahui bagaimana penduduk Bantul sampai tingkatan terbawah, bahkan para dukuh dan lurah tidak dilibatkan dalam hal ini. Jadi dugaan yang muncul adalah pendataan penduduk oleh BPS Bantul masih belum akurat untuk dijadikan sumber data pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh KPU Bantul.

Akhirnya setelah berkoordinasi dengan PPS yang sudah terbentuk diadakanlah "pendataan susulan" dan bukan pendataan ulang. Meskipun demikian masih ada saja penduduk yang belum di data, hal ini disebabkan karena ketika PPS melakukan tugas pendataan ulang atas perintah KPU Bantul, banyak mendapat kesulitan untuk bisa bertemu dengan penduduk yang akan di data untuk menjadi peserta pemilih. Dalam hal ini pihak PPS menjadi serba salah, bisa saja kemudian mereka berkoordinasi dengan Lurah atau Dukuh namun hal ini tidak dilakukan mengingat tidak ada aturan jelas yang memperbolehkan PPS menghubungi Lurah ataupun Dukuh untuk mengadakan pendataan susulan penduduk. Sementara untuk tugas semacam ini murni urusan BPS. Jadi pihak PPS hanya mendata penduduk-penduduk yang melaporkan diri belum terdaftar menjadi peserta pemilih. Sementara pihak PPS yang keanggotaannya terdapat aparat Pemerintah Desa misalnya Dukuh, maka otomatis PPS ini tidak mendapat banyak kesulitan dalam mengadakan pendataan susulan, sebab disamping sebagai

anggota PPS orang tersebut juga sebagai dukuh di Dusun itu sehingga dalam mendata penduduknya tidak menemui kesulitan berarti. Jumlah pemilih yang ditetapkan dari pusat sebanyak 711.737 orang. Namun setelah diadakan pendataan ulang maka jumlah pemilih sebanyak 712.729 pemilih yang menggunakan hak pilih di 2.135 TPS, dengan 45 kursi DPRD yang diperebutkan terbagi ke dalam 5 (lima) daerah pemilih. Pendataan tersebut dilakukan pada bulan Desember 2008. Berikut disajikan data pemilih pada Kabupaten Bantul pada masing-masing daerah pemilihan :

Tabel 3.1 Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Dapil Bantul 1

No	Uraian		Kec Jetis	Kec Bambang lipuro	Kec Bantul	Jumlah Akhir /Pindahan
DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH						
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih tetap (1a+ 1b)	LK	21.709	17.111	24.763	63.583
		PR	23.908	19.012	25.675	68.595
		JML	45.617	36.123	50.438	132.178
a. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK	16.334	11.468	17.577	45.379	
		PR	17.418	13.140	19.040	49.598
		JML	33.752	24.608	36.617	94.977
	b. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK	5.375	5.643	7.186	18.204
		PR	6.490	5.872	6.635	18.997
		JML	11.865	11.515	13.821	37.201
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Tambahan (2a + 2b)	LK	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0
a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS Lain	LK	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain	LK	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0
3	Jumlah Seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK	21.709	17.111	24.763	63.583
		PR	23.908	19.012	25.675	68.595
		JML	45.617	36.123	50.438	132.178

Tabel 3.2 Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Dapil Bantul 2

No	Uraian		Kec Pajangan	Kec Sedayu	Kec Kasihan	Jumlah Akhir /Pindahan
DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH						
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih tetap (1a+ 1b)	LK	12.045	18.599	37.285	67.929
		PR	13.049	17.168	35.823	66.040
		JML	25.094	35.767	73.108	133.969
a. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK	9.653	13.725	27.218	50.596	
		PR	10.458	12.669	26.151	49.278
		JML	20.111	26.394	53.369	99.874
	b. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK	2.392	4.874	10.067	17.333
		PR	2.591	4.499	9.672	16.762
		JML	4.983	9.373	19.739	34.095
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Tambahan (2a + 2b)	LK	0	14	10	24
		PR	0	7	5	12
		JML	0	21	15	36
a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS Lain	LK	0	10	10	20	
		PR	0	5	5	10
		JML	0	15	15	30
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain	LK	0	4	0	4
		PR	0	2	0	2
		JML	0	6	0	6
3	Jumlah Seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK	12.045	18.613	37.295	67.953
		PR	13.049	17.175	35.828	66.052
		JML	25.094	35.788	73.123	134.005

Tabel 3.3 Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Dapil Bantul 3

No	Uraian	Kec Sewon	Kec Bangun tapan	Jumlah Akhir /Pindahan	
DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH					
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih tetap (1a+ 1b)	LK	32.464	35.759	68.223
		PR	36.040	38.739	74.779
		JML	68.504	74.498	143.002
a. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih		LK	24.931	26.137	51.068
		PR	28.570	28.315	56.885
		JML	53.501	54.452	107.953
b. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih		LK	7.532	9.622	17.154
		PR	7.471	10.424	17.895
		JML	15.003	20.046	35.049
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Tambahan (2a + 2b)	LK	34	83	117
		PR	24	37	61
		JML	58	120	178
a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS Lain		LK	30	73	103
		PR	21	33	54
		JML	51	106	157
b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain		LK	4	10	14
		PR	3	4	7
		JML	7	14	21
3	Jumlah Seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK	32.498	35.842	68.340
		PR	36.064	38.776	74.840
		JML	68.562	74.618	143.180

Tabel 3.4 Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Dapil Bantul 4

No	Uraian		Kec Pleret	Kec Imogiri	Kec Dlingo	Kec Piyungan	Jumlah Akhir /Pindahan	
	DATA PEMILIH dan PENGUNAAN HAK PILIH							
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih tetap (1a+ 1b)	LK	17.858	25.765	14.486	19.115	77.223	
		PR	17.157	23.783	15.310	18.365	74.616	
		JML	35.015	49.548	29.796	37.480	151.839	
a. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih		LK	13.404	19.267	11.308	14.686	58.665	
		PR	12.878	17.785	11.998	14.110	56.771	
		JML	26.282	37.052	23.306	28.796	115.436	
	b. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih		LK	4.454	6.498	3.178	4.429	18.559
			PR	4.279	5.998	3.312	4.255	17.844
			JML	8.733	12.496	6.490	8.684	36.403
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Tambahan (2a + 2b)	LK	0	26	37	2	65	
		PR	0	8	12	4	24	
		JML	0	34	49	6	89	
a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS Lain		LK	0	13	37	2	52	
		PR	0	8	12	4	24	
		JML	0	21	49	6	76	
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain		LK	0	13	0	0	13
			PR	0	0	0	0	0
			JML	0	13	0	0	13
3	Jumlah Seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK	17.858	25.791	14.523	19.117	77.288	
		PR	17.157	23.791	15.322	18.369	74.640	
		JML	35.015	49.582	29.845	37.486	151.928	

Tabel 3.5 Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Dapil Bantul 5

No	Uraian		Kec Pundong	Kec Kretek	Kec Sanden	Kec Pamda k	Kec Srandan	Jumlah Akhir/P indahan
DATA PEMILIH dan PENGUNAAN HAK PILIH								
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih tetap (1a+ 1b)	LK	15.196	12.533	13.599	21.428	13.314	76.071
		PR	14.028	13.631	14.878	20.342	12.792	75.670
		JML	29.224	26.164	28.477	41.770	26.106	151.741
a. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK	LK	11.000	8.964	9.809	15.453	10.132	55.357
		PR	10.153	9.750	10.412	14.037	9.735	54.087
		JML	21.153	18.714	20.221	29.490	19.867	109.444
	b. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK	4.197	3.569	3.790	5.975	3.182	20.713
		PR	3.874	3.881	4.466	6.305	3.057	21.583
		JML	8.071	7.450	8.256	12.280	6.239	42.296
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Tambahannya (2a + 2b)	LK	8	4	0	12	0	24
		PR	21	0	0	9	0	30
		JML	29	4	0	21	0	54
a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahannya yang menggunakan hak pilih dari TPS Lain	LK	LK	8	2	0	9	0	19
		PR	21	0	0	7	0	28
		JML	29	2	0	16	0	47
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain	LK	0	2	0	3	0	5
		PR	0	0	0	2	0	2
		JML	0	2	0	5	0	7
3	Jumlah Seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahannya (1 + 2)	LK	15.204	12.537	13.599	21.440	13.314	76.095
		PR	14.049	13.631	14.878	20.351	12.792	75.700
		JML	29.253	26.168	28.477	41.791	26.106	151.795

Sosialisasi pemilu yang ditempuh KPU Bantul adalah sebagai berikut

- a. Target sasaran pelaksanaan sosialisasi meliputi kelembagaan seperti ormas, partai politik, birokrasi, perangkat desa, narapidana, pemilih pemula, maupun masyarakat umum.
- b. Program sosialisasi dilakukan melalui mekanisme tatap muka, TOT, iklan layanan masyarakat, poster dan pamlet serta siaran mobil keliling dilanjutkan pemutaran film sosialisasi. Sosialisasi juga dilakukan

dalam bentuk pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk di lapangan Tri rengo Bantul.

- c. Dalam pelaksanaan sosialisasi, KPU di samping menggunakan anggaran resmi yang tersedia, juga memperoleh fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan Departemen Kominfo RI. Pelaksanaan sosialisasi juga melibatkan ormas antara lain NU dan Muhammadiyah, KKN PTN/PTS serta putra putri Bantul.

Permasalahan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah keterlambatan aturan serta tidak tuntasnya aturan dan informasi yang harus disampaikan. Hal ini terkait dengan masih belum finalnya materi sosialisasi sampai pada saat pelaksanaannya. Perubahan aturan yang harus disosialisasikan senantiasa terus berubah, misalnya cara penandaan yang sah, kejelasan pencetakan buku pintar KPPS dan sebagainya.

Deskripsi pengelolaan data dan informasi pemilu adalah sebagai berikut :

1. Data dan informasi bersumber dari KPU Pusat, KPU Propinsi, Parpol peserta pemilu, Pemerintah Daerah, Panwas, Media massa serta masyarakat.
2. Pengelolaan data dan informasi pemilu belum dilakukan terintegrasi dan terstruktur karena terkendala oleh minimnya fasilitas Teknologi Informasi dan kurangnya Sumber Daya Manusia.

3. Format pengelolaannya adalah melalui sinergi dengan instansi pemerintah terkait, yaitu Kantor Pengolahan Data Elektronik, BKKBN, BKK, Humas, Dinsos dan Ormas.
4. KPU Kabupaten Bantul memberi kemudahan akses bagi publik untuk memperoleh data dan informasi pemilu melalui fasilitas website, kegiatan rutin jumpa pers, relese berita, acara talkshow, Iklan Layanan Masyarakat baliho, spanduk, poster, leaflet, serta media lainnya.

Dari keterangan diatas terdapat media yang meliput tentang pelaksanaan pemilu legislatif di Kabupaten Bantul diantara media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti Koran Kedaulatan Rakyat. Kompas. Media Elektronik seperti Jogja TV, RB TV, Radio Rejobuntung.¹

Tahap selanjutnya adalah bentuk realisasi yang sudah tertuang dalam perencanaan pelaksanaan pemilu legislatif adalah sebagai berikut :

¹ Wawancara langsung dengan Ibu Eni Nurtifah Tanggal 3 Mei 2010

1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

- a. Proses pemutakhiran data pemilih diawali dari penyerahan data kependudukan (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul kepada KPU Kabupaten pada bulan April 2008.
- b. Setelah diterima, DP4 tersebut dicetak dan diedarkan kepada PPS untuk dimutakhirkan oleh PPDP. PPDP melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data yang ada berdasarkan kondisi riil dilapangan, dengan menambah pemilih yang belum terdaftar ditulis dalam form plus, dan mengurangi/mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan menulis dalam form minus.
- c. Problema yang muncul adalah data DP4 tidak valid, sehingga banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar. Misalnya anak yang berumur < 17 tahun terdaftar sebagai pemilih, orang yang sudah meninggal, daftar nama-nama pemilih yang dobel. Kondisi ini menyulitkan proses pemutakhiran. Hal ini menjadikan permasalahan dalam pelaksanaan pemilu. Di samping itu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak melakukan tugas sesuai dengan petunjuk teknis pemutakhiran.
- d. Laporan pemutakhiran data ini selanjutnya dicetak sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS ini selanjutnya ditempelkan di masing-masing kelurahan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Meski dialokasikan waktu yang cukup namun akibat dari kurangnya

kepedulian masyarakat, tidak terjadi perbaikan signifikan terhadap DPS ini.

- e. Setelah DPS diperbaiki berdasarkan masukan dari masyarakat maka tahap selanjutnya dicetak dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

1. Pendaftaran Peserta Pemilu dan Penetapan Peserta Pemilu

KPU Bantul melakukan pendataan jumlah pemilih yang akan menggunakan haknya pada pemilu legislatif. Pendaftaran memang dilakukan oleh KPU Bantul, dalam hal ini merupakan tugas divisi Peserta pemilu Pendaftaran dan Pencalonan bekerjasama dengan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul pada bulan April 2008. Setelah terima, DP4 tersebut dicetak dan diedarkan kepada PPS untuk dimutakhirkan oleh PPDP. PPDP melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data yang ada berdasarkan kondisi riil dilapangan, dengan menambah pemilih yang belum terdaftar ditulis dalam form plus, dan mengurangi/mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan menulis dalam form minus.²

Laporan pemutakhiran data ini selanjutnya dicetak sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS ini kemudian ditempelkan di masing-masing kelurahan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, setelah DPS diperbaiki berdasarkan masukan dari masyarakat maka tahap selanjutnya dicetak dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

² Wawancara langsung dengan Sub Bag Penyelenggara (Suryadi Raharjo, SH) 29-1-2010

KPU Bantul mengurus persoalan pencalonan anggota DPRD Bantul mulai dari formulir calon, pengajuan calon oleh pengurus parpol, penelitian calon, penyampaian hasil penelitian hingga penetapan dan pengumuman calon lewat publikasi di media.

Tidak seluruh partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM dapat turut serta dalam pemilu. Partai politik baru dikatakan sebagai peserta pemilu setelah melalui tahap pendaftaran, penelitian dan penetapan dari KPU. Untuk menjadi peserta pemilu, parpol harus memenuhi beberapa persyaratan. (lebih lengkap lihat UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum). KPU Bantul melakukan verifikasi (baik keanggotaan partai maupun keberadaan sekretariat parpol bersangkutan) dengan dibantu PPK dan PPS. Hal yang sama juga dilakukan KPU pada perseorangan calon anggota DPD karena peserta pemilu tidak hanya parpol tapi perseorangan. KPU Bantul mengambil sampel dari syarat dukungan minimal. Hasil verifikasi disampaikan secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan diteruskan ke KPU. KPU lah yang akan menetapkan apakah parpol perseorangan DPD yang diteliti lolos verifikasi dan berhak menjadi peserta pemilu atau sebaliknya.

Cukup menarik kemudian seandainya kita sedikit mengupas perihal proses pendaftaran dan penetapan peserta pemilu legislatif di Kab. Bantul yang di back-up oleh Devisi Peserta Pemilu Pendaftaran dan Pencalonan.

Langkah pertama yang dilakukan devisi ini adalah dengan mendata penduduk yang akan terdaftar menjadi pemilih, dalam hal ini devisi Peserta Pemilu Pendaftaran dan Pencalonan bekerjasama dengan pihak DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Syarat Utama untuk menjadi pemilih adalah penduduk Bantul yang berumur 17 tahun yang sudah menikah atau sudah pernah menikah. Data semacam ini di dapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul yang diminta Devisi ini. Namun ketika pendataan pemilih sudah berjalan, terdapat permasalahan serius yang di temui. Dimana terdapat gugatan dari masyarakat setempat kepada pihak KPU karena masih adanya penduduk yang memenuhi syarat tapi tidak di daftar oleh KPU sebagai peserta dalam pemilihan legislatif. Menyingkapi polemik ini pihak devisi teknis penyelenggara beserta segenap jajarannya memproses pengaduan ini dengan mencari solusi dan titik temu kenapa permasalahan ini muncul.

Setelah diproses ditingkat KPU Bantul, ternyata permasalahan ini muncul karena kesalahan pihak DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memberikan data tidak valid, sehingga banyak pemilih yang memenuhi syarat masih tidak terdaftar. Kondisi ini menyulitkan proses pemutakhiran. Di samping itu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan tugas sesuai dengan petunjuk teknis pemutakhiran. Akhirnya setelah berkoordinasi dengan PPS yang sudah terbentuk diadakanlah "pendataan susulan" dan bukan pendataan ulang. Laporan pemutakhiran data ini selanjutnya dicetak sebagai Daftar Pemilih

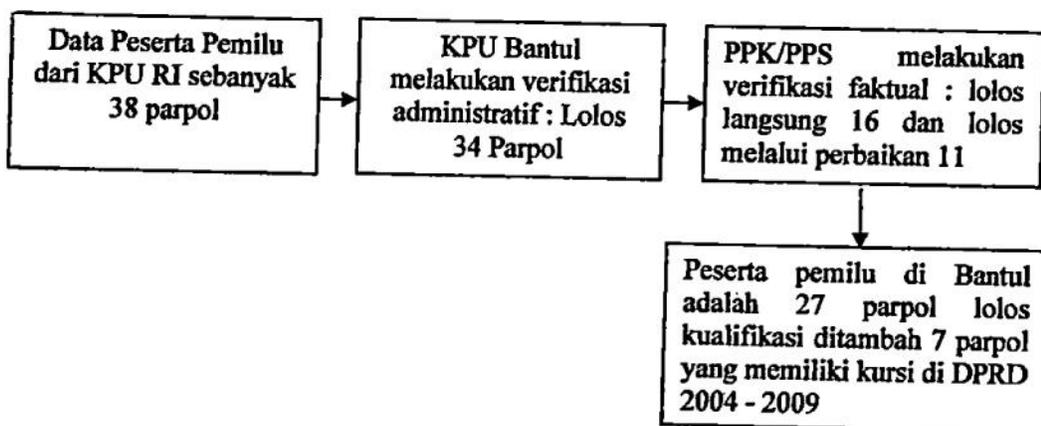
Sementara (DPS). DPS ini selanjutnya ditempelkan di masing-masing kelurahan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Setelah DPS diperbaiki berdasarkan masukan dari masyarakat maka tahap selanjutnya dicetak dan di tetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Setelah proses pendataan dan pendaftaran penduduk dianggap selesai maka langkah selanjutnya yang ditempuh devisi ini adalah dengan mengadakan sosialisasi ditingkat partai tentang syarat-syarat yang menjadi ketentuan calon legislatif. KPU Bantul memperoleh data tentang peserta pemilu dari KPU pusat, yaitu sebanyak 38 partai, KPU selanjutnya melakukan proses verifikasi administratif. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi parpol peserta pemilu adalah harus menyertakan dukungan 10% dari jumlah penduduk di Bantul yang dibuktikan dengan fotokopi KTP. Hasilnya ada 4 partai politik yang tidak lolos seleksi, sehingga parpol yang berhak mengikuti proses verifikasi faktual adalah sebanyak 34 partai politik.

Selanjutnya, PPS bersama PPK melakukan verifikasi faktual terhadap 34 partai politik yang lolos verifikasi administratif untuk dilihat kesesuaian antara data administratif yang dikumpulkan dengan fakta yang ada dilapangan. Parpol yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya dinyatakan lolos tahap pertama tanpa perbaikan adalah 16 parpol. Sementara sisanya sebanyak 11 parpol harus melakukan perbaikan data dukungan. Akhirnya parpol yang lolos tahap kedua adalah sebanyak 11 parpol.

Hasil verifikasi parpol peserta pemilu di Kabupaten Bantul menunjukkan dari 38 parpol yang diserahkan KPU RI ternyata yang lolos uji verifikasi sebanyak 27 parpol, sedangkan 4 parpol gagal. Dengan demikian, peserta pemilu di Bantul adalah 27 parpol lolos kualifikasi ditambah dengan 7 parpol yang memiliki kursi di DPRD Bantul, sehingga semua berjumlah 34 parpol.³

Adapun *flowehartnya* adalah sebagai berikut :



Adapun parpol yang lolos verifikasi tersebut adalah sebagai mana berikut :

³ Wawancara langsung dengan pelaksana sub bag umum (Eni Nurtifah) 11-3-2010

Tabel 3.6 Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Bantul

No	Nama Partai Politik yang Mendaftar	Keterangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)**	Lolos seleksi
2.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)*	Lolos seleksi
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)*	Lolos seleksi
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)**	Lolos seleksi
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**	Lolos seleksi
6.	Partai Barisan Nasional (PBN)*	Lolos seleksi
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)*	Lolos seleksi
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)***	Lolos seleksi
9.	Partai Amanat Nasional (PAN)***	Lolos seleksi
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	Tidak lolos
11.	Partai Kedaulatan (PK)	Tidak lolos
12.	Partai Persatuan Daerah (PPD)**	Lolos seleksi
13.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)***	Lolos seleksi
14.	Partai Pemuda Indonesia (PPI)**	Lolos seleksi
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenis (PNI MARAHAENISME)*	Lolos Seleksi
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)**	Lolos seleksi
17.	Partai Karya Perjuangan (PKP)**	Lolos Seleksi
18.	Partai Matahari Bangsa (PMB)**	Lolos seleksi
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	Tidak lolos
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)*	Lolos Seleksi
21.	Partai Republik Nusantara (REPUBLIKAN) **	Lolos seleksi
22.	Partai Pelopor*	Lolos seleksi
23.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)***	Lolos seleksi
24.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)***	Lolos seleksi
25.	Partai Damai Sejahtera (PDS)*	Lolos seleksi
26.	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBK)*	Lolos seleksi
27.	Partai Bulan Bintang (PBB)*	Lolos seleksi
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)***	Lolos seleksi
29.	Partai Bintang Reformasi (PBR)**	Lolos seleksi
30.	Partai Patriot*	Lolos seleksi
31.	Partai Demokrat***	Lolos seleksi
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)*	Lolos seleksi
33.	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)*	Lolos seleksi
34.	Partai Kebangkitan Ulama (PKNU)**	Lolos seleksi
35.	Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia	Tidak Lolos
36.	Partai Serikat Indonesia*	Lolos seleksi
37.	Partai Buruh*	Lolos Seleksi
38.	Partai Merdeka*	Lolos Seleksi

Keterangan :

* = Lolos langsung

** = Lolos melalui perbaikan

*** = Parpol yang memiliki kursi di DPRD Bantul

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa dari 38 partai politik yang mendaftar maka 34 partai politik yang lolos kualifikasi. Partai yang lolos langsung dalam tahap kualifikasi sebanyak 16 partai yang terdiri dari PKPB, PPPI, PBN, PKPI, PNI MARAHAENISME, PDK, Partai Pelopor, PDS, PNBK, PBB, Partai Patriot, PKDI, PIS, Partai Serikat Indonesia, Partai Buruh, Partai Merdeka.

Partai yang lolos melalui perbaikan sebanyak 11 partai yang terdiri dari HANURA, PPRN, GERINDRA, PPD, PPI, PDP, PKP, PMB, REPUBLIKAN, PBR, dan PKNU. Sedangkan partai yang mempunyai kursi di DPRD Bantul sebanyak 7 partai yaitu PKS, PAN, PKB, GOLKAR, PPP, PDIP, dan Partai Demokrat. Partai yang tidak lolos seleksi sebanyak 4 partai yaitu PPIB, PK, PPDI dan Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia.

2. Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

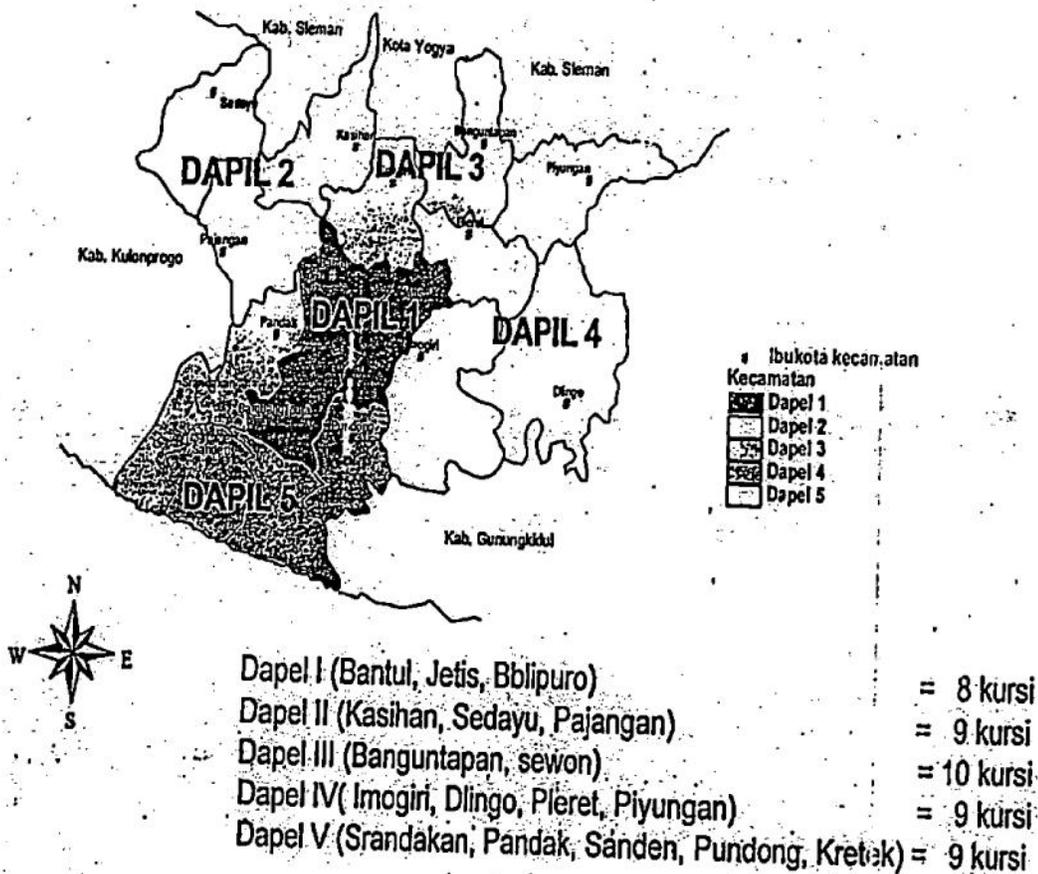
Jumlah jatah kursi DPRD dan Dapil di Kabupaten sama persis dengan kondisi jumlah kursi dan dapil pada pemilu 2004 berdasarkan pada surat perintah dari KPU. Jumlah kursi DPRD Bantul sebanyak 45 kursi, sedangkan Dapilnya sebanyak 5 yang meliputi :⁴

- | | |
|---|------------|
| 1. Dapil 1 (Bantul, Jetis, Bambanglipura) | = 8 kursi |
| 2. Dapil 2 (Pajangan, Kasihan, Sedayu) | = 9 kursi |
| 3. Dapil 3 (Sewon, Banguntapan) | = 10 kursi |

⁴ Hasil wawancara dengan staf sub bag hukum dan humas (Sudjati) tgl 22-2-2010

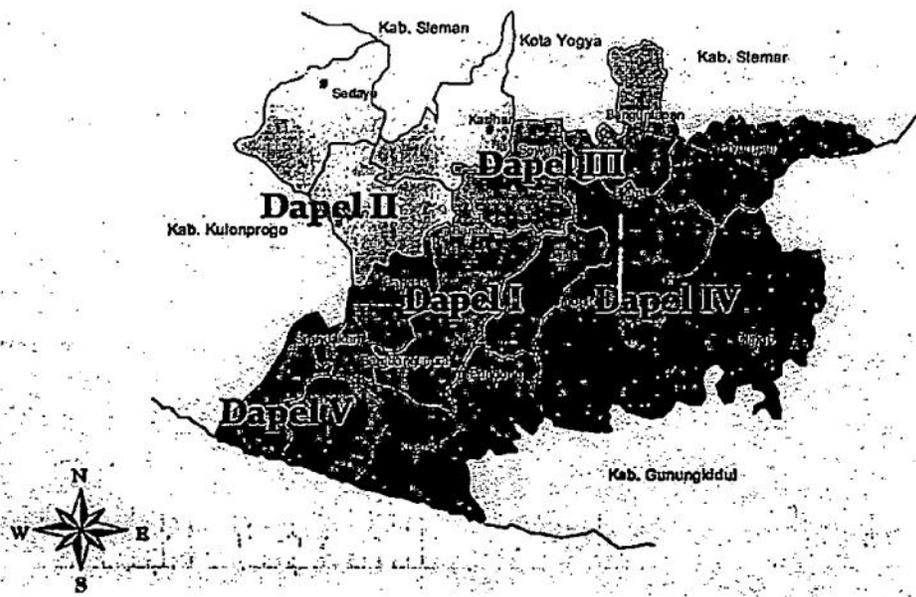
4. Dapil 4 (Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri) = 9 kursi
5. Dapil 5 (Srandakan, Sanden, Kretek, Pandak, Pundong) = 9 kursi

Supaya pembaca lebih memiliki gambaran yang cukup mantap maka alangkah baiknya jika penulis juga menyertakan sekilas data mengenai simulasi peta daerah pemilihan di Kabupaten Bantul berdasarkan daerah pemilihan adalah sebagai berikut :



Sumber Data: KPU Kab. Bantul

Gambar 3.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Bantul



Gambar 3.2 Pembagian Dapel Pileg Kab Bantul

Berdasarkan peta daerah pemilihan legislatif tersebut, penulis bermaksud memberikan suatu gambaran atau deskripsi mengenai wilayah-wilayah yang masuk dalam wilayah kerja KPU Kab. Bantul selama pemilu legislatif berlangsung.

Daerah pemilihan di Kabupaten Bantul terdiri dari 5 daerah pemilihan yaitu Dapil 1 yang meliputi Bantul, Jetis, Bambanglipuro. Dapil 2 yang meliputi Pajangan, Kasihan, Sedayu. Dapil 3 yang meliputi Sewon, Banguntapan. Dapil 4 yang meliputi Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri. Dapil 5 yang meliputi Srandakan, Sanden, Kretek, Pandak, Pundong.

Selain peta daerah pemilihan, penulis juga menyertakan daftar nama calon yang terpilih dalam pemilu legislatif di Kabupaten Bantul sesuai data yang diperoleh penulis secara langsung di sekretariat KPU

Bantul. Daftar nama calon yang terpilih dalam pemilu legislatif di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :⁵

⁵ Data sesuai dengan laporan evaluasi penyelenggara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009

Tabel 3.7
Profil Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Bantul
Dalam Pemilu Legislatif 2009
Dapil Bantul I

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan	Agama	Alamat	Partai
1	Purwanto	Laki-laki	Bantul, 13 Juni 1972	SMA	Islam	Dahromo, Segoroyoso, Pleret, Bantul	Gerindra
2	H. Agus Effendi, SE	Laki-laki	Bantul, 4 Mei 1969	S1	Islam	Bendo RT 04/04 Wukirsari, Imogiri, Bantul	PKS
3	Fachruddin, S.Ag	Laki-laki	Bantul, 18 Desember 1971	S1	Islam	Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul	PAN
4	Muhamad Agusalim	Laki-laki	Bantul, 15 Agustus 1970	SMA	Islam	Teruman RT 04 Kersen, Bantul	PKB
5	Arni Tyas Palupi, ST	Perempuan	Bantul, 4 Januari 1981	S1	Islam	Nyangkringan RT 01, Bantul, Bantul	GOLKAR
6	Eko Julianto Nugroho, SE	Laki-laki	Bantul, 02 Juli 1973	S1	Kristen	Kanutan RT 05, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	PDIP
7	Dwi Kristiantoro, ST	Laki-laki	Bantul, 11 Desember 1972	S1	Kristen	Bobok RT 01/42, Patalan, Bantul	PDIP
8	H. Ary Dewanto, SE	Laki-laki	Bantul, 25 Agustus 1968	S1	Islam	Melikan Lor/Gandekan RT 06, Bantul	DEMOKRAT

Sumber Data : KPU Kab. Bantul

Tabel 3.8
Profil Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Bantul
Dalam Pemilu Legislatif 2009
Dapil Bantul II

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan	Agama	Alamat	Partai
1	Dra. Hj. Ita Dwi Nuryanti	Perempuan	Pasuruhan, 20 Oktober 1969	S1	Islam	Grojogan RT 05 Wirokerten, Banguntapan, Bantul	GERINDRA
2	Arif Haryanto, S.Si	Laki-laki	Bantul, 06 Januari 1978	S1	Islam	Perum GKP RT 35, Bandut Lor RT 35, Argorejo, Sedayu, Bantul	PKS
3	Sarinto, S.Pd.	Laki-laki	Wonogiri, 20 Februari 1951	S1	Islam	Jogonalan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	PAN
4	Dra. Sri Sulistyanningtyas	Perempuan	Bantul, 16 Februari 1960	S1	Katholik	Sundi Kidul RT 30 Argorejo, Sedayu, Bantul	GOLKAR
5	Jumakir	Laki-laki	Bantul, 4 Juni 1976	SMA	Islam	Kembaran RT 07 RW 21 Tamantirto, Kasihan, Bantul	PPP
6	Uminto Giring Wibowo, SE., MM., MH	Laki-laki	Semarang, 15 September 1962	Sarjana	Islam	Jogonalan Lor 88 A, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	PDIP
7	Panudiyana	Laki-laki	Bantul, 05 Maret 1967	SMA	Islam	Kayuhan Wetan, Triwidadi, Pajangan, Bantul	PDIP
8	Drs. Timbul Harjana	Laki-laki	Bantul, 18 April 1966	S1	Katholik	Karangio RT 04, Argomulyo, Sedayu, Bantul	PDIP
9	Suhidi, SH	Laki-laki	Lahat, 13 Juni 1969	S1	Islam	Tonalan RT 34, Argosari, Sedayu, Bantul	DEMOKRAT

Sumber Data : KPU Kab. Bantul

Tabel 3.9
Profil Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Bantul
Dalam Pemilu Legislatif 2009
Dapil Bantul III

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan	Agama	Alamat	Partai
1	Gunawan, SH	Laki-laki	Bantul, 13 April 1969	S1	Islam	Jl. Raya Bantul Km 7,5 Diro RT 58 Pendowoharjo, Sewon, Bantul	GERINDRA
2	Agung Laksmono, S.Si	Laki-laki	Pekalongan, 5 Agustus 1972	S1	Islam	Plumbon, Jalan Pura 380 RT 14 Banguntapan, Bantul	PKS
3	Wildan Nafis, SE	Laki-laki	Bantul, 25 Juli 1973	S1	Islam	Glagah Kidul, Tamanan, Banguntapan	PAN
4	H. Ichwan Tamrin Murdiyanta, SE	Laki-laki	Kulon Progo, 16 Juni 1967	S1	Islam	Jl. Bantul, Diro, Pendowoharjo, Sewon, Bantul	PAN
5	Subhan Nawwawi	Laki-laki	Bantul, 15 September 1968	SMA	Islam	Bakung, Bangunharjo, Sewon, Bantul	PKB
6	Drs. H. Agus Subagyo	Laki-laki	Bantul, 05 Agustus 1962	S1	Islam	Krapyak Wetan No 177 Panggungharjo, Sewon Bantul	GOLKAR
7	Bariq Gufron	Laki-laki	Bantul, 15 Februari 1957	SMA	Islam	Kepuh Wetan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul	PPP
8	Yudha Prathesissianta Wibowo, SE	Laki-laki	Yogyakarta, 16 Januari 1972	S1	Islam	Tegalsari RT 05, Jomblangan, Banguntapan, Bantul	PDIP
9	Ispriyatun/Katir Tri Atmojo	Laki-laki	Bantul, 01 April 1968	SMA	Islam	Balong Kidul, Banjardadap, Potorono, Banguntapan, Bantul	PDIP
10	Edy Prabowo, SE	Laki-laki	Yogyakarta, 24 Februari 1972	S1	Islam	Pelemwulung RT 02 RW 43 Banguntapan, Bantul	DEMOKRAT

Sumber Data : KPU Kab. Bantul

Tabel 3.10
Profil Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Bantul
Dalam Pemilu Legislatif 2009
Dapil Bantul IV

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan	Agama	Alamat	Partai
1	Agung Wisdha Sardjana, SH	Laki-laki	Yogyakarta, 19 September 1964	S1	Islam	Kemusuk Kidul RT 02 Argomulyo, Sedayu, Bantul	PKPB
2	Amir Syarifudin	Laki-laki	Bantul, 24 September 1969	SMEA	Islam	Banyakan I RT 03, Sitimulyo, Piyungan, Bantul	PKS
3	Suratun, SH	Perempuan	Wonogiri, 25 Agustus 1961	S1	Islam	Segoroyoso, Segoroyoso, Pleret, Bantul	PAN
4	Drs. H. Aslam Ridlo	Laki-laki	Bantul, 02 Mei 1967	S1	Islam	Jejeran I, Wonokromo, Pleret, Bantul	PKB
5	Drs. H. Suwardi	Laki-laki	Bantul, 2 Maret 1959	S1	Islam	Genting, Tirtomulyo, Kretek, Bantul	GOLKAR
6	Hj. Maslakah	Perempuan	Bantul, 31 Mei 1966	S1	Islam	Wonokromo II, Pleret, Bantul	PPP
7	Hanung Raharjo, ST	Laki-laki	Bantul, 29 Mei 1980	S1	Islam	Manggung, Wukirsari, Imogiri, Bantul	PDIP
8	Suratman	Laki-laki	Bantul, 17 Februari 1976	SMA	Islam	Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul	PDIP
9	Betmen Sebayang, SH	Laki-laki	Medan, 5 Maret 1972	S1	Islam	Demi Jati RT 02, Sriharjo, Imogiri, Bantul	DEMOKRAT

Sumber Data : KPU Kab. Bantul

Tabel 3.11
Profil Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Bantul
Dalam Pemilu Legislatif 2009
Dapil Bantul V

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan	Agama	Alamat	Partai
1	Amad Badawi	Laki-laki	Bantul, 28 November 1967	SMA	Islam	Bintaran, Srimulyo, Piyungan, Bantul	PKPB
2	Jupriyanto, S.Si	Laki-laki	Bantul, 6 Desember 1974	S1	Islam	Bongos I, Gadingsari, Sanden, Bantul	PKS
3	Tur Haryanta, SH	Laki-laki	Bantul, 26 Agustus 1969	S1	Islam	Dukuh RT 01 Gadingsari, Sanden, Bantul	PAN
4	Sadji, S.Pd	Laki-laki	Bantul, 9 Juni 1944	S1	Islam	Wonorejo I, Gadingsari, Sanden, Bantul	PAN
5	Slamet Bagya, SE.,SIP	Laki-laki	Bantul, 16 November 1958	S1	Islam	Kwalangan RT 01 Wijirejo, Pandak, Bantul	GOLKAR
6	Eko Sutrisno Aji	Laki-laki	Bantul, 10 Agustus 1976	SMA	Islam	Jodog IV, Gilangharjo, Pandak, Bantul	PPP
7	Basuki Rahmat, SE	Laki-laki	Bantul, 10 Desember 1975	S1	Islam	Kemiri RT 01 Dk XII, Gadingsari, Sanden, Bantul	PDIP
8	Tustiyani, SH	Perempuan	Bantul, 25 Agustus 1975	S1	Islam	Mancingan XI, Parangtritis, Kretek, Bantul	PDIP
9	Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md	Laki-laki	Bantul, 16 Juli 1973	D3	Islam	Paten DK XIV Lopati, Trimurti, Srandakan, Bantul	DEMOKRAT

Sumber Data : KPU Kab. Bantul

4. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bantul

Proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat (MS) pasca verifikasi serta partai politik yang memperoleh jatah kursi di DPRD pada pemilu 2004 berhak untuk mencalonkan kader-kadernya sebagai caleg. Dari 38 parpol yang lolos verifikasi hanya 34 parpol yang mengirimkan calegnya. Jumlah total caleg yang diajukan adalah sebanyak 603 caleg.
- b. Berkas caleg yang diajukan parpol selanjutnya diverifikasi secara administrasi. Mereka yang lolos verifikasi ini selanjutnya tercantum dalam daftar Calon Sementara (DCS). Adapun caleg yang tercantum dalam DCS sebanyak 529 orang.
- c. DCS selanjutnya diumumkan kepada masyarakat melalui media massa Bernas untuk mendapatkan tanggapan. Respon public cukup tinggi. Ada laporan tentang beberapa caleg berikut: Setyawan Harisonya (Partai Golkar) dilaporkan terlibat kasus pidana; Ahmad Badhawi (PKPB) dilaporkan karena belum mundur dari jabatan dukuh; dan Tur Haryanto (PAN) dilaporkan karena terindikasi terlibat dalam kasus pidana. Hasilnya jumlah caleg yang lolos ke dalam Daftar Calon Tetap adalah sebanyak 526 orang, karena ada caleg yang meninggal (PAN), dan dua orang mengundurkan diri (PKS, Golkar).
- d. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa secara kumulatif keterwakilan perempuan dalam DCT adalah 33% sementara ada beberapa partai yang

tidak memenuhi kuota 30% perempuan. Sayangnya hal ini juga tidak ada sanksi yang bisa diterapkan secara tegas.

5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

a. Problem pengadaan logistik oleh KPU Bantul

Pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2009 seluruh pengadaan logistik dilakukan oleh KPU Pusat dan KPU Propinsi. KPU Kabupaten Bantul hanya melakukan proses pelelangan jasa distribusi logistik oleh 3 rekanan. Proses lelang pun berjalan dengan baik dengan memakan waktu 45 hari.

b. Pengelolaan dan distribusi penerimaan logistik dari KPU

Penerimaan logistik dari propinsi dilihat dari aspek waktu cukup baik karena bisa lebih awal dikirimkan. Namun dari sisi kualitas logistik, bahan yang diadakan KPU propinsi berkualitas rendah dan akhirnya mengganggu proses setting. Kualitas bolpoin serta sampul sangat buruk. Sehingga pada saat pelaksanaan pemilu banyak masyarakat yang mengeluh karena logistik yang kurang baik seperti bolpoin macet, kertas surat suara yang sobek, dll. Sementara itu penerimaan logistik dari KPU Pusat secara kualitas cukup baik kecuali surat suara yang banyak cacat. Namun secara kuantitas masih kurang sampai menjelang pelaksanaan distribusi logistik. Hal ini terjadi karena koordinasi yang kurang baik. KPU terpaksa melakukan kunjungan dan komunikasi dengan KPU Pusat di Jakarta hanya untuk mengurus kekurangan logistik. Bahkan tragisnya, anggota KPU harus

mengambil sendiri logistik yang berupa tinta dan segel dari Jakarta. Dalam kasus logistik pemilu ini, KPU Bantul mengalami kasus unik yaitu tidak munculnya nama caleg PDIP No. 9 atas nama Agustinus Susanto Nugroho untuk DCT Propinsi DIY Dapel 2 Bantul, sehingga sempat memunculkan perdebatan antara KPU Bantul dan KPU DIY selaku pihak yang melakukan verifikasi nama. Solusi yang ditempuh akhirnya adalah melalui proses stikerisasi surat suara sesuai perintah dari KPU Pusat, yang merupakan kasus unik dalam penyelenggaraan pemilu 2009.

c. Distribusi dan Setting Logistik

Proses setting logistik yang sangat kompleks memakan waktu hingga lima hari kerja. Namun demikian, hal ini bukan persoalan karena seluruh kelengkapan logistik yang diadakan oleh KPU Propinsi telah tiba lebih awal, sehingga bisa dipacking awal.⁶

Kendala yang muncul berupa kualitas surat suara yang buruk dan mengalami banyak cacat, serta kejelasan aturan dari pusat yang tidak konsisten dan datang mendadak menyebabkan setting dan pelipatan surat suara tidak berjalan lancar, namun selalu menyesuaikan dengan instruksi dari KPU Pusat yang terus berubah-ubah. Secara kuantitas, logistik pemilu 2009 tercukupi. Demikian pula proses distribusi dari KPU ke TPS berjalan lancar karena adanya dukungan pihak kepolisian dan perusahaan jasa angkutan yang professional.

⁶ Wawancara langsung oleh bag logistik (Martupon) tgl 9-2-2010

d. Problem kualitas SDM pelaksana pemilu di lapangan (PPK/PPS/KPPS)

Dalam aspek kapabilitas, kondisi anggota PPK/PPS memang cukup beragam. Ada beberapa anggota PPK/PPS yang memang mampu sehingga pengelolaan di tingkat kecamatan dapat berjalan baik dan lancar. Namun ada juga personal PPK/PPS yang kapabilitasnya kurang sehingga memerlukan bimbingan khusus dari KPU secara intensif.

Kondisi kurangnya kapabilitas PPK/PPS ini selanjutnya diperparah dengan terlambatnya kedatangan buku panduan bagi KPPS. Karena tidak jelasnya waktu distribusi buku panduan di samping kemudian terbukti secara material isi buku juga banyak mengandung kesalahan, sementara pihak KPPS telah menunggunya, maka KPU hanya bisa terus menunggu petunjuk teknis yang memang mesti diatur oleh KPU. Akibatnya banyak kebijakan yang datang mendadak dan harus segera disosialisasikan. Salah satu kasusnya adalah perubahan kebijakan tentang cara penandaan yang benar, sehingga proses sosialisasi dilakukan ke KPPS pada malam menjelang hari pemungutan suara. Hal ini benar-benar menunjukkan tidak adanya rencana matang dan menyulitkan pelaksana di bawah.

e. Dinamika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS

Pada hari-H pemungutan suara, sempat terjadi kasus kekurangan surat suara pada dua TPS di Banguntapan. Hal ini

disebabkan tertukarnya sampul surat suara daerah itu dengan Dapil 5 Kretek. Kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat melalui koordinasi antara PPK yang dilakukan oleh KPU Bantul.

Pada hari H juga sempat terjadi kekurangan lembar C2 Plano di beberapa TPS kecamatan Sedayu. Solusi yang diambil adalah dengan melakukan fotokopi C2 Plano oleh KPPS yang mengalami kekurangan dan kemudian diganti oleh KPU Bantul.

Sementara pada proses penghitungan suara di TPS berjalan lancar. Kendati memakan waktu cukup lama, batas waktu jam 00.00 WIB dapat dipenuhi oleh semua KPPS sebagai batas akhir waktu penghitungan suara. Adapun keluhan yang muncul dari KPPS adalah kelelahan yang memuncak karena harus menghitung satu persatu semua perolehan suara dari 529 calon dan 34 partai.

Selanjutnya yang juga sempat menjadi persoalan adalah masalah kesamaan pemahaman pengisian form C1 (sertifikat) yang memang rumit. Banyak KPPS yang tidak mengisi dengan benar sertifikat ini, sehingga perlu dikoreksi pada saat rekap di tingkat kecamatan.

f. Fasilitasi bagi pemilih difabel

Pada pemilu 2009 ini juga ditandai pertama kalinya diadakan fasilitas template bagi kaum tuna netra. Hal ini memang cukup membantu. Namun karena tidak adanya data yang pasti di TPS mana terdapat kaum difabel, maka pemberian template dilakukan kepada

seluruh TPS. Hal ini mengindikasikan adanya pemborosan anggaran dan tidak efisien mengingat mahalnya harga template. Sementara tugas membantu pemilih difabel yang dibebankan kepada petugas nomor 4 di TPS berjalan dengan baik dan tidak ada complain dari parpol peserta pemilu.

6. Penetapan Hasil Pemilu

Deskripsi kegiatan penetapan hasil pemilu legislatif adalah sebagai berikut:

1. Dinamika dan problem pelaksanaan rekapitulasi ditingkat PPK

Kegiatan rekapitulasi di tingkat PPK merupakan salah satu perubahan signifikan penyelenggaraan pemilu 2009, yang pada pemilu sebelumnya selalu dilakukan di PPS. Mengingat proses rekapitulasi dilakukan langsung di PPK dan tidak lagi di PPS, maka dampaknya pekerjaan bertumpuk di level ini. Dinamika yang berlangsung menunjukkan ada beberapa anggota PPK yang komplain karena tidak berimbangnya beban kerja antara PPK dan PPS yang tak diimbangi dengan perbedaan honor yang signifikan. Ketika honor PPK dinaikkan setara dengan Panwascam juga sempat memunculkan komplain dari PPS, yang selanjutnya berniat enggan membantu PPK dalam proses rekap.

Proses rekapitulasi di PPK memakan waktu antara 2 sampai 3 hari. PPK berhasil melakukan rekap secara cepat karena menggunakan kearifan lokal dengan menyiapkan dan mengolah data terlebih dahulu secara informal berdasarkan kesepakatan dengan saksi dan panwas yang

selanjutnya disajikan dalam acara formal. Sedangkan PPK yang menggunakan jalur formal, harus menghabiskan waktu 3 hari untuk menyelesaikan rekap ini.

Ketersendatan proses rekap di beberapa PPK juga disebabkan oleh kualitas SDM operator LCD yang kurang memahami software yang digunakan KPU dalam proses rekapitulasi. Sementara persentase tingkat kehadiran saksi sangat kecil, banyak parpol-parpol yang tak mengirimkan saksi.

Sedangkan hasil proses rekap di PPK sebagian besar berjalan lancar. Hanya ada satu proses rekap di kecamatan Kasihan yang berjalan agak a lot karena adanya perbedaan persepsi antara PPK, panwascam dan saksi parpol terkait tatacara rekapitulasi. Namun demikian pada batas waktu yang ditentukan persoalan bisa diatasi dengan baik. Sementara itu, proses rekap di Banguntapan menjadi persoalan tersendiri secara teknis, mengingat jumlah desa yang sangat banyak dalam satu kecamatan yaitu 86 desa, sehingga proses rekap normal tetap membutuhkan waktu yang lebih lama dari kecamatan lain. Hal ini perlu ada solusi penambahan personal yang membantu PPK.

2. Dinamika dan problem pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Bantul

Proses rekapitulasi di kantor KPU Bantul berlangsung lancar. Hal ini karena proses rekap yang penuh dinamika telah dilalui di Kecamatan. Saksi parpol sebagian besar hadir, dan tidak ada komplain berarti yang diajukan. Semua saksi mengisi daftar hadir dan tidak ada keberatan

saksi. Komplain sempat muncul ketika hasil penghitungan yang ditayangkan berbeda dengan yang dimiliki saksi. Setelah di cross check dengan sertifikat C1 di dalam kotak suara akhirnya masalah terpecahkan.

3. Pengumuman hasil pemilu di setiap level rekapitulasi hasil

Pengumuman hasil pemilu dilakukan oleh PPS dengan menempel di kelurahan. Sedangkan PPK mengumumkannya di kantor kecamatan. Sedangkan KPU Bantul mengumumkan hasil rekapitulasi dengan menempel di papan pengumuman KPU maupun melalui website KPU Bantul di www.kpu.bantulkab.go.id. Fakta dari lapangan menunjukkan tidak ada keberatan dari parpol peserta pemilu tentang pengumuman hasil ini.

4. Proses Penetapan Suara Parpol untuk Calon Anggota DPRD Kab Bantul

Proses penetapan suara parpol untuk calon anggota DPRD dilakukan oleh KPU Bantul setelah proses rekap di KPU selesai. Proses penetapan suara parpol dihadiri oleh sebagian partai politik, khususnya parpol yang potensial mendapatkan kursi. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :⁷

⁷ Data Data sesuai dengan laporan evaluasi penyelenggara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2010

Tabel 3.1 Data Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Bantul

No	Nama	Daerah Pemilihan					Jumlah
		1	2	3	4	5	
1	Partai Hanura	2584	1017	1574	2227	1386	8788
2	Partai Karya Peduli Bangsa	2188	2327	1612	4851	5874	16852
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	641	3394	678	682	0	5395
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1014	0	358	0	813	2185
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4089	4013	3364	3635	3145	18264
6	Partai Barisan Nasional	285	273	172	1208	0	1938
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	244	638	642	293	686	2503
8	Partai Keadilan Sejahtera	6439	7185	8825	7939	9185	39573
9	Partai Amanat Nasional	10402	9412	17364	15185	14755	67118
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	0	0	0	0	0
11	Partai Kedaulatan	0	0	0	0	0	0
12	Partai Persatuan Daerah	196	199	114	848	199	1556
13	Partai Kebangkitan Bangsa	4309	3593	3950	7788	3851	23491
14	Partai Pemuda Indonesia	1424	303	967	1991	0	4685
15	Partai PNI Marhaenisme	0	0	146	0	221	367
16	Partai Demokrasi Pembaruan	3438	596	1647	821	495	6997
17	Partai Karya Perjuangan	0	47	58	0	0	105
18	Partai Matahari Bangsa	501	134	128	387	169	1319
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	0	0	0	0	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	336	220	913	1832	21850	25151
21	Partai Republika Nusantara	468	765	405	264	647	2549
22	Partai Pelopor	104	198	93	83	113	591
23	Partai Golkar	5843	8690	9099	5374	9623	38629
24	Partai Persatuan Pembangunan	3626	7592	3764	5494	4944	25420
25	Partai Damai Sejahtera	222	680	481	96	336	1815
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	70	102	203	0	0	375
27	Partai Bulan Bintang	1498	349	481	2737	687	5752
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19817	25474	22009	25599	19763	112662
29	Partai Bintang Reformasi	381	273	1548	510	413	3125
30	Partai Patriot	148	217	1929	180	414	2888
31	Partai Demokrat	11302	10911	12458	11025	14582	60278
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	236	211	0	0	0	447
33	Partai Indonesia Sejahtera	70	0	0	398	479	947
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	3139	2121	2442	2845	1493	12040
35	Partai Merdeka	67	76	47	0	103	293
36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0	0	0	0	0	0
37	Partai Sarikat Indonesia	78	0	0	0	0	78
38	Partai Buruh	0	0	80	0	0	80
Total Suara Sah		85159	91010	97551	104292	116226	494238

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa hasil perolehan suara pemilu legislatif tertinggi pada daerah pemilihan 1,2,3,4 dan 5 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara pada daerah 1 sebesar 19.817, daerah pemilihan 2 sebesar 25.474, daerah pemilihan 3 sebesar 22.009, daerah pemilihan 4 sebesar 25.599 dan daerah pemilihan 5 sebesar 19.763. Sedangkan hasil perolehan suara untuk partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Kedaulatan, partai Penegak Demokrasi Indonesia, partai persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia pada daerah pemilihan 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah 0.

5. Proses Penetapan Perolehan Kursi Parpol untuk Anggota DPRD Kab Bantul

Proses penetapan perolehan kursi parpol untuk calon anggota DPRD dilakukan oleh KPU Bantul setelah proses rekap di KPU selesai. Proses penetapan perolehan kursi parpol dihadiri oleh sebagian partai politik, khususnya parpol yang potensial mendapatkan kursi. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Perhitungan Perolehan Kursi Tahap I Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2009 Dapil Bantul I

No	NAMA PARTAI	SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA
1.	Partai Hanura	2.584	0	2.584
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.188	0	2.188
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	610	0	610
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.014	0	1.014
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.089	0	4.089
6.	Partai Barisan Nasional	285	0	285
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	244	0	244
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6.439	0	6.439
9.	Partai Amanat Nasional	10.402	0	10.402
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	-	0	0
11.	Partai Kedaulatan	-	0	0
12.	Partai Persatuan Daerah	196	0	196
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.309	0	4.309
14.	Partai Pemuda Indonesia	1.424	0	1.424
15.	Partai PNI Marhaenisme	-	0	0
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	3.438	0	3.438
17.	Partai Karya Perjuangan	-	0	0
18.	Partai Matahari Bangsa	501	0	501
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	0	0
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	336	0	336
21.	Partai Republika Nusantara	468	0	468
22.	Partai Pelopor	104	0	104
23.	Partai Golkar	5.843	0	5.843
24.	Partai Persatuan Pembangunan	3.626	0	3.626
25.	Partai Damai Sejahtera	222	0	222
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	70	0	70
27.	Partai Bulan Bintang	1.498	0	1.498
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.817	1	9.176
29.	Partai Bintang Reformasi	381	0	381
30.	Partai Patriot	148	0	148
31.	Partai Demokrat	11.302	1	661
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	236	0	236
33.	Partai Indonesia Sejahtera	70	0	70
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	3.139	0	3.139
35.	Partai Merdeka	67	0	67
36.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-	0	0
37.	Partai Sarikat Indonesia	78	0	78
38.	Partai Buruh	-	0	0
Total Suara Sah		85.128	2	63.846

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2009

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa perolehan kursi pada Dapil Bantul 1 yaitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat yang masing-masing memperoleh 1 kursi. Daftar perolehan kursi tersebut masih di dominasi oleh partai-partai besar terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan 1 kursi dan Partai Demokrat dengan perolehan 1 kursi.

Tabel 3.3 Perhitungan Perolehan Kursi Tahap I Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2009 Dapil Bantul 2

No	NAMA PARTAI	SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA
1.	Partai Hanura	1.017	0	1.017
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.327	0	2.327
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.394	0	3.394
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	-	0	-
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.013	0	4.013
6.	Partai Barisan Nasional	273	0	273
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	638	0	638
8.	Partai Keadilan Sejahtera	7.185	0	7.185
9.	Partai Amanat Nasional	9.412	0	9.412
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	-	0	-
11.	Partai Kedaulatan	-	0	-
12.	Partai Persatuan Daerah	199	0	199
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.593	0	3.593
14.	Partai Pemuda Indonesia	303	0	303
15.	Partai PNI Marhaenisme	-	0	-
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	596	0	596
17.	Partai Karya Perjuangan	47	0	47
18.	Partai Matahari Bangsa	134	0	134
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	0	-
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	220	0	220
21.	Partai Republika Nusantara	765	0	765
22.	Partai Pelopor	198	0	198
23.	Partai Golkar	8.690	0	8.690
24.	Partai Persatuan Pembangunan	7.592	0	7.592
25.	Partai Damai Sejahtera	680	0	680
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	102	0	102
27.	Partai Bulan Bintang	349	0	349
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	25.474	2	5.250
29.	Partai Bintang Reformasi	273	0	273
30.	Partai Patriot	217	0	217
31.	Partai Demokrat	10.911	1	799
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	211	0	211
33.	Partai Indonesia Sejahtera	-	0	-
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2.121	0	2.121
35.	Partai Merdeka	76	0	76
36.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-	0	-
37.	Partai Sarikat Indonesia	-	0	-
38.	Partai Buruh	-	0	-
	Total Suara Sah	91.010	3	60.674

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2009

Tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa perolehan kursi pada Dapil Bantul 2 untuk masing-masing partai politik tidak merata, masih didominasi oleh partai-partai besar yaitu partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Perolehan jumlah suara yang sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 25.474 dengan jatah 2 kursi dan Partai Demokrat memperoleh jumlah suara yang sah sebanyak 10.911 dengan jatah 1 kursi.

Tabel 3.4 Perhitungan Perolehan Kursi Tahap I Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2009 Dapil Bantul 3

No	NAMA PARTAI	SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA
1.	Partai Hanura	1.574	0	1.574
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1.612	0	1.612
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	678	0	678
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	358	0	358
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.364	0	3.364
6.	Partai Barisan Nasional	172	0	172
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	642	0	642
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.825	0	8.825
9.	Partai Amanat Nasional	17.364	1	7.609
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	-	0	-
11.	Partai Kedaulatan	-	0	-
12.	Partai Persatuan Daerah	114	0	114
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.950	0	3.950
14.	Partai Pemuda Indonesia	967	0	967
15.	Partai PNI Marhaenisme	146	0	146
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	1.647	0	1.647
17.	Partai Karya Perjuangan	58	0	58
18.	Partai Matahari Bangsa	128	0	128
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	0	-
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	913	0	913
21.	Partai Republika Nusantara	405	0	405
22.	Partai Pelopor	93	0	93
23.	Partai Golkar	9.099	0	9.099
24.	Partai Persatuan Pembangunan	3.764	0	3.764
25.	Partai Damai Sejahtera	481	0	481
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	203	0	203
27.	Partai Bulan Bintang	481	0	481
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22.009	2	2.499
29.	Partai Bintang Reformasi	1.548	0	1.548
30.	Partai Patriot	1.929	0	1.929
31.	Partai Demokrat	12.458	1	2.703
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	-	0	-
33.	Partai Indonesia Sejahtera	-	0	-
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2.442	0	2.442
35.	Partai Merdeka	47	0	47
36.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-	0	-
37.	Partai Sarikat Indonesia	-	0	-
38.	Partai Buruh	80	0	80
	Total Suara Sah	93.996	4	58.531

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2009

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa perolehan kursi pada Dapil Bantul 3 masih di dominasi oleh partai-partai besar yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh jumlah suara sah sebanyak 22.009

jiwa dengan perolehan 2 kursi, Partai Amanat Nasional yang memperoleh jumlah suara sah sebanyak 17.364 dengan perolehan 1 kursi, dan Partai Demokrat yang memperoleh jumlah suara sah sebanyak 12.458 dengan perolehan 1 kursi.

Tabel 3.5 Perhitungan Perolehan Kursi Tahap I Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2009 Dapil Bantul 4

No	NAMA PARTAI	SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA
1.	Partai Hanura	2.227	0	2.227
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	4.851	0	4.851
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	682	0	682
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	-	0	-
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.635	0	3.635
6.	Partai Barisan Nasional	1.208	0	1.208
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	293	0	293
8.	Partai Keadilan Sejahtera	7.939	0	7.939
9.	Partai Amanat Nasional	15.185	1	3.597
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	-	0	-
11.	Partai Kedaulatan	-	0	-
12.	Partai Persatuan Daerah	848	0	848
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.788	0	7.788
14.	Partai Pemuda Indonesia	1.991	0	1.991
15.	Partai PNI Marhaenisme	-	0	-
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	821	0	821
17.	Partai Karya Perjuangan	-	0	-
18.	Partai Matahari Bangsa	387	0	387
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	0	-
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.832	0	1.832
21.	Partai Republika Nusantara	264	0	264
22.	Partai Pelopor	83	0	83
23.	Partai Golkar	5.374	0	5.374
24.	Partai Persatuan Pembangunan	5.494	0	5.494
25.	Partai Damai Sejahtera	96	0	96
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	-	0	-
27.	Partai Bulan Bintang	2.737	0	2.737
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	25.599	2	2.423
29.	Partai Bintang Reformasi	510	0	510
30.	Partai Patriot	180	0	180
31.	Partai Demokrat	11.025	0	11.025
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	-	0	-
33.	Partai Indonesia Sejahtera	398	0	398
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2.845	0	2.845
35.	Partai Merdeka	-	0	-
36.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-	0	-
37.	Partai Sarikat Indonesia	-	0	-
38.	Partai Buruh	-	0	-
	Total Suara Sah	104.292	3	69.528

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa perolehan kursi untuk Dapil Bantul 4 masih didominasi oleh partai besar yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh jumlah suara yang sah sebanyak 25.599 dengan jatah 2 kursi dan Partai Amanat Nasional memperoleh jumlah suara yang sah sebanyak 15.185 dengan jatah 1 kursi.

Tabel 3.6 Perhitungan Perolehan Kursi Tahap I Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2009 Dapil Bantul 5

No	NAMA PARTAI	SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA
		1.386	0	1.386
		5.874	0	5.874
1.	Partai Hanura	-	0	-
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	-	0	813
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	813	0	3.145
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	3.145	0	-
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	0	686
6.	Partai Barisan Nasional	686	0	9.185
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	9.185	0	4.021
8.	Partai Keadilan Sejahtera	14.755	1	-
9.	Partai Amanat Nasional	-	0	-
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	-	0	199
11.	Partai Kedaulatan	199	0	3.851
12.	Partai Persatuan Daerah	3.851	0	-
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	-	0	221
14.	Partai Pemuda Indonesia	221	0	495
15.	Partai PNI Marhaenisme	495	0	-
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	-	0	169
17.	Partai Karya Perjuangan	169	0	-
18.	Partai Matahari Bangsa	-	0	2.180
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2.180	0	647
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	647	0	113
21.	Partai Republika Nusantara	113	0	9.623
22.	Partai Pelopor	9.623	0	4.944
23.	Partai Golkar	4.944	0	336
24.	Partai Persatuan Pembangunan	336	0	-
25.	Partai Damai Sejahtera	-	0	687
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	687	0	9.035
27.	Partai Bulan Bintang	19.763	1	413
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	413	0	414
29.	Partai Bintang Reformasi	414	0	3.854
30.	Partai Patriot	14.582	1	-
31.	Partai Demokrat	-	0	479
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	479	0	1.493
33.	Partai Indonesia Sejahtera	1.493	0	103
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	103	0	-
35.	Partai Merdeka	-	0	-
36.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-	0	-
37.	Partai Sarikat Indonesia	-	0	-
38.	Partai Buruh	-	0	-
	Total Suara Sah	96.556	3	64.371

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2009

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa perolehan kursi untuk Dapil 5 Bantul adalah Partai Amanat Nasional memperoleh jumlah suara sebanyak 14.755 dengan perolehan kursi sebanyak 1, Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh jumlah suara sebanyak 19.763 dengan jumlah kursi sebanyak 1, dan Partai Demokrat memperoleh jumlah suara sebanyak 14.582 dengan perolehan kursi sebanyak 1.

B. Kendala Yang di Hadapi Oleh KPU Bantul dalam Pelaksanaan Peran dan Fungsi Sebagai Pelaksana Pemilu Legislatif Tahun 2009

Kendala yang dihadapi oleh KPU Bantul dalam pelaksanaan peran dan fungsi sebagai pelaksana pemilu legislatif tahun 2009 adalah sebagai berikut:⁸

1. Dalam hal pemutakhiran data pemilih, keberadaan data DP4 yang diberikan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagian besar tidak valid, sehingga menyulitkan proses pemutakhiran data untuk diolah menjadi Data Calon Sementara (DCS).
2. Selanjutnya, pada proses pemutakhiran data pemilih juga mendapatkan kendala dari kurang efektifnya dukuh sebagai PPDP dalam menjalankan fungsinya.
3. Sementara pada proses rekrutmen penyelenggaraan pemilu, permasalahan yang muncul adalah animo masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota PPK/PPS tidak merata yang mengakibatkan terdapat kecamatan dan desa yang surplus peminat, sehingga sangat kompetitif seperti di Kasihan dan Sedayu, namun ada juga yang kurang peminat seperti di Pleret dan Bantul. Untuk mengatasi kecamatan yang minim pendaftar, KPU meminta bantuan kepada Camat dan Lurah untuk

⁸ Wawancara langsung dengan pelaksana sub bag umum (Eni Nurtifah) 11-3-2010

mengusulkan tambahan calon anggota PPK dan PPS guna melengkapi batas minimal keanggotaan PPK dan PPS. Namun ironisnya belum tersedia insentif bagi Lurah dan Camat terkait dengan proses rekrutmen PPK/PPS tersebut.

4. Sementara persoalan yang muncul dalam proses rekrutmen KPPS adalah batas usia minimal (25 tahun) yang tidak terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan dan keharusan dimilikinya surat keterangan bebas pidana (*leges*) dari Pengadilan Negeri serta surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari instansi berwenang yang memberatkan bagi calon KPPS.
5. Proses rekrutmen panwaslukab dan panwascam terlambat dilakukan. Hal ini karena imbas dari keterlambatan pembentukan struktur kelembagaan ditingkat yang lebih atas yaitu pembentukan Bawashu dan Panwaslu DIY yang juga mengalami keterlambatan.
6. Dalam pelaksanaan Bimtek, materi seringkali tidak bisa diberikan tuntas pada hari-H pelaksanaan Bimtek. Hal ini disebabkan sering terjadinya perubahan aturan dari KPU RI, sehingga materi yang diberikan sering belum sempurna dan menunggu juknis dan perubahan aturan lebih lanjut.
7. Dalam kegiatan sosialisasi permasalahan yang muncul adalah keterlambatan aturan serta tidak tuntasnya aturan dan informasi yang harus disampaikan. Hal ini terkait dengan masih belum finalnya materi sosialisasi sampai pada saat pelaksanaannya. Perubahan aturan yang

- harus disosialisasikan senantiasa terus berubah, misalnya cara penandaan yang sah, kejelasan pencetakan buku pintar KPPS dan sebagainya.
8. Sementara dalam pengadaan logistik, kendala yang muncul adalah kualitas surat suara yang buruk dan mengalami banyak cacat, serta kejelasan aturan dari pusat yang tidak konsisten dan datang mendadak menyebabkan setting dan pelipatan surat suara tidak berjalan lancar, namun selalu menyesuaikan dengan instruksi dari KPU Pusat yang terus berubah-ubah.
 9. Dalam hal penertiban atribut kampanye, aturan belum berjalan dengan tuntas, karena masih ada beberapa atribut yang belum ditertibkan sendiri oleh peserta Pemilu pada H-1. Hal ini terjadi karena aturan batasan pembersihan atribut pada H-1 oleh peserta Pemilu sulit diimplementasikan. Disamping itu sanksi bagi yang melakukan pelanggaran juga tidak diatur secara tegas.
 10. Dalam pembentukan penyelenggara pemilu kecamatan, di Kabupaten Bantul terdapat kecamatan yang membawahi 86 desa (Banguntapan). Konsekuensinya proses sosialisasi, bimtek, dan rekapitulasi secara normal tetap membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kecamatan lain. Dalam realitasnya, fasilitas dan sumberdaya manusia di kecamatan ini disamakan dengan kecamatan lain, sehingga terjadi perbedaan beban kerja yang sangat timpang.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Bantul dalam menanggulangi kendala-kendala diatas adalah:⁹

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul hendaknya terus melakukan aktualisasi data kependudukannya secara rutin, mengingat produk datanya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilu.
2. Dukuh selaku anggota KPPS tidak lagi dilibatkan dalam PPDP, namun sebaiknya petugas KPPS selain dukuh, agar dapat menjalankan fungsi pemutakhiran dengan benar.
3. Perlu dialokasikan pada anggaran DIPA untuk mengakomodasikan keterlibatan lurah dan camat dalam pembentukan PPK dan PPS guna mengurangi resistensi.
4. Dilakukan evaluasi persyaratan menjadi KPPS agar implementatif.
5. Adanya aturan inovatif guna memberikan fasilitas tambahan bagi wilayah kecamatan yang arealnya sangat luas, baik dalam hal sumberdaya maupun fasilitas lainnya, sehingga tercipta keadilan bagi penyelenggara.

⁹ Wawancara langsung dengan pelaksana sub bag umum (Eni Nurtifah) 11-3-2010